

BAB V

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan akan menjelaskan analisa hasil yang diperoleh dari pengolahan data. Penulis melakukan beberapa simulasi model dan percobaan *trial and error* untuk memperoleh model yang terbaik dalam mencapai tujuan penelitian. Penulis memilih model yang terbaik dengan cara membandingkan tingkat signifikansi (*t-test*, *F-test* dan *adjusted R²*) dan pelanggaran asumsi dasar. Berbagai langkah percobaan dan simulasi terhadap model penelitian hingga diperoleh model yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

V.1. Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penggunaan model pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ini adalah untuk mengetahui apakah indikator desentralisasi fiskal yang ditunjukkan oleh peningkatan Dana Perimbangan yang dalam studi kali ini hanya menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan. Oleh karena itu, penulis menggunakan model sebagai berikut.

$$eduspend_{it} = f(dak_{it}, dau_{it}, ycap_{it}, ddes)$$

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, data yang digunakan adalah data panel yakni gabungan *time series* dan *cross section*. Untuk menguji metode data panel apa yang cocok dengan data dan model diatas maka digunakan *chow test* dan *hausman test* yang hasil outputnya dapat dilihat pada bagian lampiran V.A.

Dari hasil *chow test* untuk menguji pendekatan mana yang cocok antara *pooled least square* dan *fixed effect* ternyata menghasilkan metode yang cocok digunakan adalah *fixed effect*. Selanjutnya penulis melakukan pengujian dengan *hausman test* untuk menguji pendekatan mana yang cocok antara *random effect* dan *fixed effect*. Dari hasil hausman test, diperoleh kesimpulan pendekatan yang cocok digunakan juga *fixed effect*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk model pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah *fixed effect*.

Selanjutnya dengan menggunakan model diatas dan diolah dengan *software E-views*, maka diperoleh hasil ringkasan output sebagai berikut (hasil output lengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran V.B.):

Tabel V.a. Ringkasan Output Model Pengeluaran Pendidikan Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Dependen variabel : LOG(EDUSPEND?))

Variabel	Koefisien	t-statistic
LOG(DAU?)	0.045687	0.539066
LOG(DAK?)	0.098714	2.743046**
LOG(YCAP?)	1.756984	5.881295**
DDES?	0.075841	26.638918***
R-squared	: 0.739872	
Adjusted R-squared	: 0.612587	
F-statistic	: 51.98754	
Prob(F-statistic)	: 0.000000	
Durbin-Watson stat	: 1.936871	
Total Panel Observation	: 686	

Keterangan signifikansi:

- *** : Signifikan dalam $\alpha = 1\%$
- ** : Signifikan dalam $\alpha = 5\%$
- * : Signifikan dalam $\alpha = 10\%$

V.1.1. Pengujian Asumsi Dasar

a. *Multikolinearity*

Pengujian adanya *multikolinearity* dapat dilihat dari nilai *correlation matrix* seperti pada tabel dibawah ini. Regresi diatas terbebas dari adanya *multikolinearity*. Hal tersebut dikarenakan nilai korelasi (r) antar variable bebas kurang dari 0.8 (*rule of thumb* dari ada atau tidaknya *multikolinearity*).

Tabel V.b. *Correlation Matrix* Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

	DAK	DAU	DDES	YCAP
DAK	1	0.189675432	0.259871645	0.487681123
DAU	0.189675432	1	0.185448635	0.654713514
DDES	0.259871645	0.185448635	1	0.358794123
YCAP	0.487681123	0.654713514	0.358794123	1

b. *Heterocedasticity*

Heterocedasticity terjadi ketika *sum square residual unweighted* (ssruw) > *sum square residual weighted* (ssrw). Nilai ssruw dan ssrw hasil output diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

SSRW	9874.365
SSRUW	9635.654

Oleh karena, nilai ssruw lebih kecil dari nilai ssrw maka dapat disimpulkan tidak terjadi *heterocedasticity*. Selain itu, hasil output tersebut menggunakan *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance* sehingga dapat dianggap hasil regresi tersebut maka hasil output diatas telah terbebas dari *heterocedasticity*.

c. Autokorelasi

Untuk melihat adanya pelanggaran autokorelasi kita dapat membandingkan antara nilai DW-stat dengan tabel DW dalam menentukan dL dan dU. Dari tabel DW dengan $n = 686$ dan $k = 4$ maka diperoleh dL sebesar 1.728 dan dU sebesar 1.810. Output diatas menunjukkan nilai DW-statnya sebesar 1.936871. Oleh karena nilai DW statnya terletak antara Du (1.810) dan 4-dU (2.190) maka dapat disimpulkan tidak ada *autokorelasi*.

V.1.2. Analisa Hasil Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Dari pengujian asumsi dasar baik *multikolinearity*, *autokorelasi*, *heterocedasticity* menghasilkan bahwa hasil regresi tersebut sudah terbebas dari pelanggaran asumsi dasar. Oleh karena itu, hasil regresi model pengeluaran pemerintah pendidikan diatas menjadi acuan dalam analisa studi kali ini dapat kita tulis kembali seperti tabel berikut ini.

Dependen variabel : LOG(EDUSPEND?)

Variabel	Koefisien	t-statistic
LOG(DAU?)	0.045687	0.539066
LOG(DAK?)	0.098714	2.743046**
LOG(YCAP?)	1.756984	5.881295**
DDES?	0.075841	26.638918***
R-squared	: 0.739872	
Adjusted R-squared	: 0.612587	
F-statistic	: 51.98754	
Prob(F-statistic)	: 0.000000	
Durbin-Watson stat	: 1.936871	
Total Panel Observation	: 686	

Keterangan signifikansi:

- *** : Signifikan dalam $\alpha = 1\%$
- ** : Signifikan dalam $\alpha = 5\%$
- * : Signifikan dalam $\alpha = 10\%$

Dari hasil regresi diatas, berdasarkan uji t stat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota (EDUSPEND?) adalah Dana Alokasi Khusus pendidikan (DAK?) dan PDRB riil per kapita (YCAP?) serta dummy desentralisasi (DDES?). Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU?).

Dilihat dari F-stat dimana probability F-stat sebesar 0.000000 (prob F stat < α (1%)) yang berarti variabel independen dalam persamaan model pengeluaran pemerintah untuk pendidikan diatas (DAU?, DAK?, YCAP? Dan DDES?) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (EDUSPEND?) pada tingkat keyakinan 99%. Jika dilihat dari koefisien determinasinya (R^2 dan *adjusted R²*) yakni sebesar 0.739872 untuk R^2 dan 0.612587 untuk *adjusted R²* yang menggambarkan variasi dari variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya sebesar 61.25%.

Penjelasan dan analisa lebih lanjut tentang pengaruh variabel DAU?, DAK? dan YCAP? serta dummy desentralisasi terhadap variabel EDUSPEND berdasarkan hasil regresi diatas akan dijelaskan dibawah ini.

a. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil regresi diatas, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menerima DAU yang cukup besar kurang mengalokasikan anggarannya untuk pengeluaran pembangunan termasuk pengeluaran sektor pendidikan dan sesuai dengan hipotesa awal penulis. Sebagian besar DAU digunakan oleh pemerintah propinsi tersebut untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Padahal dalam formula DAU terdapat perhitungan

indeks pembangunan manusia (IPM) dimana terdapat indikator pendidikan sebagai salah satu perhitungan kebutuhan fiskal.

Sejak desentralisasi, terjadi pelimpahan pegawai dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga pembiayaan pembelanjaan pegawai merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota atau beban APBD yang dapat dibiayai dengan DAU dan PAD. Kabupaten/kota di pulau Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap DAU lebih cenderung mengalokasikan sebagian besar DAUnya untuk membiayai belanja pegawai dibandingkan pengeluaran pembangunan termasuk pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, seperti yang terlihat pada **Tabel V.d.** dibawah ini.

Tabel V.d. Perbandingan Proporsi DAU dan Proporsi Belanja Pegawai Beberapa Kabupaten/kota di Pulau Jawa (Tahun 2005)

No	Kabupaten/Kota	Rasio DAU Terhadap Total Penerimaan	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran
1	Kab. Madiun	0.76	0.65
2	Kab. Nganjuk	0.76	0.67
3	Kab. Ponorogo	0.76	0.66
4	Kab. Magelang	0.76	0.64
5	Kab. Kebumen	0.76	0.68
6	Kota Madiun	0.76	0.55
7	Kab. Jember	0.76	0.66
8	Kab. Gunung Kidul	0.76	0.62
9	Kab. Pemalang	0.76	0.60
10	Kab. Klaten	0.76	0.71
11	Kab. Demak	0.77	0.53
12	Kab. Blitar	0.77	0.69
13	Kab. Wonosobo	0.77	0.54
14	Kab. Ngawi	0.77	0.74
15	Kab. Ciamis	0.78	0.71
16	Kab. Pacitan	0.78	0.62
17	Kab. Pandeglang	0.78	0.61
18	Kab. Tasikmalaya	0.78	0.64
19	Kab. Brebes	0.79	0.64
20	Kab. Bondowoso	0.79	0.52

Sumber : Diolah dari APBD Kabupaten/Kota, DJPK Depkeu

Berdasarkan tabel tersebut, kabupaten/kota yang memiliki rasio DAU terhadap total penerimaan kabupaten/kota cukup tinggi memiliki rasio pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran juga cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar DAU akan dialokasikan untuk pengeluaran rutin. Dari hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kurang menangkap tujuan dari DAU secara implisit adalah untuk pembiayaan pendidikan.

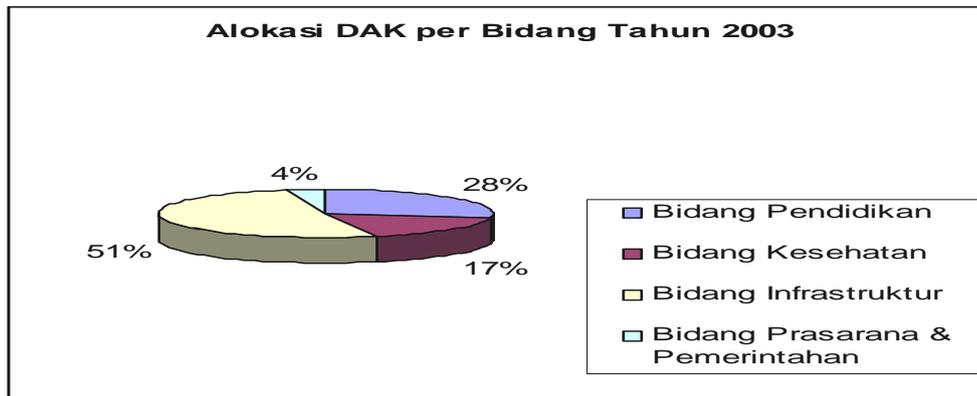
b. Variabel Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK)

Variabel Dana Alokasi Khusus pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 95%. Peningkatan DAK khususnya DAK pendidikan akan meningkatkan persentase pengeluaran pembangunan sektor pendidikan pemerintah kabupaten/kota.

Elastisitas DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota adalah 0.098714 dimana peningkatan DAK sebesar 1% akan meningkatkan pengeluaran pendidikan sebesar 0.098 %. Dari hasil tersebut dapat dikatakan elastisitas PAD terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota bersifat elastis. Dari hasil elastisitas ini menggambarkan bahwa pengaruh DAK relatif kecil terhadap pengeluaran pendidikan.

Dengan adanya DAK per bidang khususnya DAK bidang pendidikan sejak tahun 2003 mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Hal tersebut dikarenakan DAK per bidang dapat meminimalkan kemungkinan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan DAK tersebut untuk alokasi pengeluaran selain bidang atau sektor yang telah dikhususkan DAK tersebut. Besarnya alokasi DAK per bidang tahun 2003 dapat dilihat pada **Gambar V.a.** dibawah ini.

Gambar V.a.



Hasil regresi tersebut sesuai dengan pendapat Edy Priyono yang menyatakan bahwa dengan mekanisme DAK, rantai panjang dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota yang rawan KKN akan bisa dipangkas. Selain itu tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana DAK pendidikan tersebut untuk keperluan diluar sektor pendidikan dan pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol dalam batas-batas wajar dalam penggunaan dana tersebut.

c. Variabel PDRB Riil Per Kapita (YCAP)

PDRB riil per kapita berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan 1% PDRB riil per kapita akan meningkatkan 1.76 % pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil ini terlihat bahwa permintaan akan pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan. Semakin meningkat pendapatan per kapita masyarakat maka semakin meningkat permintaan akan pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota.

d. Variabel Dummy Desentralisasi (DDES?)

Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan sebelum desentralisasi, pengeluaran pendidikan meningkat sebesar 0.075841 setelah desentralisasi. Dari hasil ini terlihat bahwa pemerintah kabupaten/kota terdorong untuk meningkatkan pengeluarannya. Selain itu, diberlakukannya UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang berisi tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD telah mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan anggarannya walupun masih jauh dari 20%.

V.2. Model Akses Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat keefektifan dari pengeluaran pendidikan pemerintah tersebut terhadap akses pendidikan dan pengaruh desentralisasi terhadap akses pendidikan, penulis menggunakan model sebagai berikut.

$$ger = f(eduspend_{it}, ilterate_{it}, ycap_{it}, ddes)$$

Seperti pada model pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, untuk menguji pendekatan data panel apa yang cocok dengan data dan model diatas maka digunakan *chow test* dan *hausman test* yang hasil outputnya dapat dilihat pada bagian lampiran V.C. Dari *chow test* diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan yang digunakan *pooled least square* bukan *fixed effect*.

Dengan menggunakan model diatas dan diolah dengan *software E-views 4*, maka diperoleh hasil ringkasan output sebagai berikut (hasil output lengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran V.D.):

Tabel V. e. Ringkasan Output Model Akses Pendidikan

(Dependen variabel : LOG(GER?))

Variabel	Koefisien	t-statistic	
C	2.940264	127.6749***	R ² : 0.689124
LOG(EDUSPEND?)	0.018356	16.67556***	Adjusted R ² : 0.526317
LOG(YCAP?)	0.051625	34.81519***	DW-Stat : 2.139050
LOG(ILTERATE?)	-0.020222	-11.34521***	F-Statistic : 319966.6
DDES?	0.016954	6.577394***	Prob(F-statistic) : 0.00000
			Total Panel Observations : 686

Keterangan signifikansi:

- *** : Signifikan dalam $\alpha = 1\%$
- ** : Signifikan dalam $\alpha = 5\%$
- * : Signifikan dalam $\alpha = 10\%$

V.2.1. Pengujian Asumsi Dasar

a. . *Multikolinearity*

Pada output akses pendidikan diatas tidak terdapat *multikolinearity* karena nilai korelasi antar variabel bebas bernilai kurang dari 0.8. Oleh karena itu, model akses pendidikan telah terbebas dari *multikolinearity*. Hasil *correlation matrix*nya dapat dilihat pada **Tabel V. f.** dibawah ini.

Tabel V. f. *Correlation Matrix* Model Akses Pendidikan

	DDES	ILTERATE	EDUSPEND	YCAP
DDES	1	-0.24685713	0.354897124	0.016879455
ILTERATE	-0.24685713	1	0.06787821	-0.205463223
EDUSPEND	0.354897124	0.06787821	1	0.1847684338
YCAP	0.016879455	-0.205463223	0.1847684338	1

b. *Heterocedasticity*

Seperti pada model pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, deteksi adanya *heterocedasticity* juga dengan membandingkan *sum square residual unweighted* (ssruw) dan *sum square residual weighted* (ssrw). Nilai ssruw dan ssrw hasil output diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

SSRW	11.99491
SSRUW	12.78115

Oleh karena, nilai ssruw lebih besar dari nilai ssrw maka dapat disimpulkan terjadi *heterocedasticity*. Untuk mengatasinya dengan *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance* tersebut maka hasil output diatas telah terbebas dari *heterocedasticity*.

c. *Autokorelasi*

Nilai DW output diatas adalah sebesar 2.139050. Oleh karena nilai DW nya mendekati 2 maka diduga tidak terjadi *autokorelasi*. Jika dibandingkan dengan tabel DW dengan $n = 686$ dan $k = 5$ maka diperoleh dL sebesar 1.718 dan dU sebesar 1.820. Oleh karena nilai DW stat terletak antara dU (1.820) dan $4-dU$ (2.180) juga dapat disimpulkan tidak adanya *autokorelasi*.

V.2.2. Analisa Hasil Model Akses Pendidikan

Model akses pendidikan ditujukan untuk mengetahui tingkat keefektifan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan pemerintah propinsi dan kebijakan desentralisasi terhadap akses pendidikan. Hasil regresi model pengeluaran pemerintah

akses pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA yang telah dibahas sebelumnya dan menjadi acuan dalam analisa studi kali ini dapat kita tulis kembali seperti tabel berikut ini.

(Dependen variabel : LOG(GER?))

Variabel	Koefisien	t-statistic	
C	2.940264	127.6749***	R ² : 0.689124
LOG(EDUSPEND?)	0.018356	16.67556***	Adjusted R ² : 0.526317
LOG(YCAP?)	0.051625	34.81519***	DW-Stat : 2.139050
LOG(ILTERATE?)	-0.020222	-11.34521***	F-Statistic : 319966.6
DDES?	0.016954	6.577394***	Prob(F-statistic) : 0.00000
			Total Panel Observations : 686

Keterangan signifikansi:

- *** : Signifikan dalam $\alpha = 1\%$
- ** : Signifikan dalam $\alpha = 5\%$
- * : Signifikan dalam $\alpha = 10\%$

Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel-variabel dependen (EDUSPEND, ILITERATE, YCAP dan DDES) dalam persamaan akses pendidikan juga berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel independen (GER). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F-statistiknya yang lebih besar dari F tabel pada nilai kritis α (1%) atau Probabilitas F-stat lebih kecil dari nilai kritis α (1%). Nilai adjusted R² dari model akses layanan pendidikan sebesar 0.526317 yang berarti *goodness of fit* nya cukup baik atau variasi dari variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independennya sebesar 52.63%.

Berdasarkan uji *t statistic*, pengeluaran pendidikan (EDUSPEND) pemerintah kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap *gross enrolment rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA. Faktor lain yang berpengaruh terhadap *gross enrolment rate* tingkat SD,

SLTP dan SLTA antara lain PDRB per kapita (YCAP) dan tingkat buta huruf dewasa (ILTERATE). Kebijakan desentralisasi juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat GER SD, SLTP dan SLTA yang ditunjukkan dengan signifikannya pengaruh variabel dummy desentralisasi (DDES).

Penjelasan tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya pada model akses pendidikan akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

a. Variabel pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota (EDUSPEND)

Pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota berkorelasi signifikan terhadap *gross enrolment rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA pada tingkat keyakinan 99%. Korelasi antara persentase pengeluaran pembangunan sektor pendidikan positif terhadap akses pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA. Semakin meningkatnya tingkat pengeluaran pendidikan pemerintah akan meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan pemerintah cukup efektif dalam memperbaiki akses pendidikan.

Elastisitas persentase pengeluaran pendidikan terhadap *gross enrolment rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.018356 dimana peningkatan persentase pengeluaran pendidikan sebesar 1% akan meningkatkan tingkat GER SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.018 %. Oleh karena elastisitasnya bernilai kurang 1 maka persentase pengeluaran pendidikan terhadap *gross enrolment rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA bersifat inelastis.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sensitivitas antara persentase pengeluaran pendidikan dan GER SD, SLTP dan SLTA relatif kecil. Sensitivitas yang relatif kecil tersebut menunjukkan masih kurang efektifnya pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

b. Variabel pendapatan per kapita (YCAP)

Variabel yang menggambarkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ini berpengaruh positif terhadap *gross enrolment rate* tingkat SD, SLTP dan SLTA pada tingkat keyakinan 99%. Semakin tingginya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maka kemampuan untuk menyekolahkan anaknya semakin meningkat sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Elastisitas pendapatan per kapita terhadap *Gross Enrolment Rate* (GER) tingkat SLTP sebesar 0.051625 atau bersifat inelastis. Peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1% akan meningkatkan tingkat GER SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.05 persen. Jika dibandingkan dengan variabel lainnya (REDUSPEND, ILTERATE dan Dummy Desentralisasi), pendapatan per kapita memiliki elastisitas yang paling besar terhadap GER SD, SLTP dan SLTA. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita merupakan faktor yang penting dalam memperbaiki kase masyarakat terhadap pendidikan..

c. Variabel Tingkat Buta Huruf Dewasa (ILTERATE)

Tingkat buta huruf dewasa (usia diatas 18 tahun) berpengaruh negatif terhadap *gross enrolment rate* tingkat SD, SLTP, SLTA pada tingkat keyakinan 99%. Variabel ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan orang tua atau latar belakang keluarga dimana orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong anaknya untuk sekolah cukup tinggi. Jika tingkat buta huruf dewasa menurun yang menggambarkan tingkat pendidikan orang tua semakin meningkat yang akan mendorong anaknya untuk sekolah lebih tinggi sehingga *gross enrolment rate* akan meningkat.

Elastisitas tingkat buta huruf dewasa terhadap *gross enrolment rate* (GER) SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.020222 yang menunjukkan bersifat inelastis antara tingkat buta huruf dewasa dan GER SD, SLTP dan SLTA. Tingkat buta huruf dewasa meningkat sebesar 1% akan menurunkan tingkat GER SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.02 %.

d. Variabel Dummy Desentralisasi (DDES)

Tujuan dari variabel ini adalah untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap akses pendidikan atau *gross enrolment rate* tingkat SD, SLTP dan SLTA. Dari hasil regresi diatas, terlihat bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akses layanan pendidikan. Kebijakan desentralisasi ini dimana terdapat dana perimbangan yang semakin meningkat khususnya DAK pendidikan penting untuk memperbaiki *gross enrolment rate* tingkat SLTP.

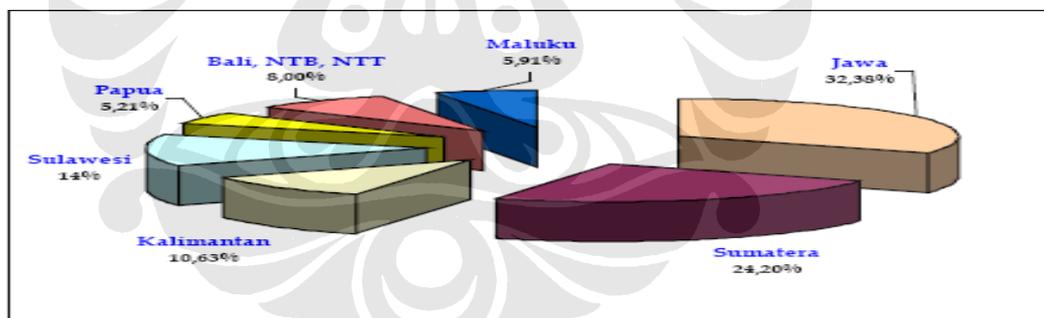
Kebijakan desentralisasi berkorelasi positif terhadap *gross enrolment rate* (GER) tingkat SLTP sebesar 0.016954. Hasil tersebut menunjukkan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi akan meningkatkan akses pendidikan atau GER tingkat SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.016 %. Faktor lain yang menyebabkan NER meningkat karena adanya kebijakan desentralisasi adalah adanya stimulasi anggaran dari pemerintah pusat untuk bidang-bidang pelayanan dasar masyarakat seperti DAK Non DR bidang pendidikan dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini baru diberlakukan pada tahun 2004.

Berbeda dengan dana perimbangan khususnya DAK Non DR yang langsung diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi

serta tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dengan demikian, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pendanaan sektoral di daerah yang sistem pengalokasiannya dilakukan melalui anggaran kementerian atau lembaga.²⁴ Perbandingan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada kementerian atau lembaga tahun 2004 berdasarkan pulau dapat dilihat pada **Gambar V. c.** dibawah ini.

Gambar V. c. Perbandingan Alokasi Dana Kementerian atau Lembaga Berdasarkan Pulau (Tahun Anggaran 2004)



Sumber: DJAPK, Departemen Keuangan

Dari kedua model diatas, dihasilkan bahwa besarnya pengaruh DAK pendidikan terhadap akses pendidikan SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.001812. Pengaruh yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa alokasi pemerintah pengaruhnya kecil terhadap akses pendidikan.

²⁴ *Ibid*